



## Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang

**Iwan Henri Kusnadi<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)

**Nuraida<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[nuraida\\_74@gmail.com](mailto:nuraida_74@gmail.com)

**Wahyudin Furqoni<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[wf.wahyudinfurqoni@gmail.com](mailto:wf.wahyudinfurqoni@gmail.com)

### Abstrak

Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan ada 4 hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif antarlain pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia belum merata. jumlah usaha kecil menengah (UKM) di bidang industri hasil hutan di Kabupaten Subang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang, Kepala/ Staff Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Petugas Lapangan dan Pemilik UMKM Olahan Kayu Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Subang locusnya di Kantor UMKM dan Koperasi Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan KS Tubun Subang, Adapun penelitian ini akan direncanakan pada bulan januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang belum optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan karena Pada Dimensi Sumberdaya, jumlah staff yang dirasa kurang proporsional dengan wilayah kerja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang selalu memiliki ketersediaan perlengkapan kantor.

**Kata Kunci :** Implementasi, Ekonomi Kreatif

### **Abstract**

*Creative economy development to advance publik welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia; Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute greatly to gross domestic product (GDP). The Central Statistics Agency (2020) states that there are 4 things that still need to be addressed to increase the potential for the creative economy, including the uneven growth of the creative economy in Indonesia. The number of small and medium enterprises (UKM) in the forest product industry in Subang Regency has increased every year. This study aims to determine the Implementation of Creative Economy Development Policies in Wood Processed MSMEs in Subang Regency. In this study using qualitative methods. The informants in this study were parties related to this research, including the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Division of the Cooperative Office, SME Industry and Trade in Subang Regency, the head / staff of the Management Section of Micro, Small and Medium Enterprises, Head / Staff of the Section for Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises, Field Officers and Owners of Wood Processed UMKM. Based on the explanation above, the implementation of the Creative Economy Development Policy at Timber Processed MSMEs in Subang Regency has not been optimal, taking into account the dimensions of Policy Implementation because in the Resource Dimension, the number of staff is deemed not proportional to the work area, the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade District Subang has budget constraints even though the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Subang Regency always has the availability of office equipment.*

**Keywords:** Implementation, Creative Economy

### **Pendahuluan**

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan Sebagaimana Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional



diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pembangunan perekonomian harus berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara; dan dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi

"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

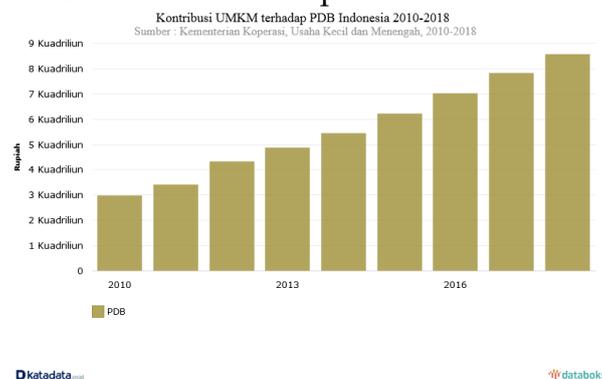
Pasal 33 ayat (1) dan (3), UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Maka pemerintah jawa barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diharapkan mampu menembus berbagai kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Adapun kontribusi dari UMKM bagi perekonomian dapat dilihat dalam grafik dibawah ini

Gambar  
Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-umkm-terhadap-perekonomian-indonesia>

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengidentifikasi beberapa indikator permasalahan dalam implementasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang, antara lain :

1. Jumlah UMKM di Kabupaten Subang yang terdata pada saat ini adalah lebih dari 25.705 (<https://www.lampusatu.com/headline/2-374-pelaku-umkm-subang-sudah-dapat-bantuan-dari-pemerintah-sebesar-rp-24-juta/>), bila melihat jumlah



pelaksana lapangan dalam penyuluhan dan pemberdayaan UMKM secara keseluruhan adalah 50 orang maka rasionya 1 orang penyuluh harus mampu membina 500 UMKM sedangkan pelaksana teknis tersebut terbagi lagi kedalam bidang-bidang lain seperti industry kreatif atau bagian lainnya oleh karena itu sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM kab. Subang masih dirasa kurang.

2. Hasil olahan kayu di Kabupaten Subang sampai saat ini belum memiliki nama seperti halnya hasil olahan kayu dari jepara, situbondo hal ini dapat disebabkan kurangnya pembinaan dan pameran untuk mengenalkan produk olahan kayu Kabupaten Subang yang diikuti oleh dinas terkait dalam pengembangannya.

## **Kerangka Teori**

### **Kebijakan Publik dan Definisi Ahli**

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan" (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

William N. Dunn (2003:132).menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

"Kebijakan Publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah"

Edward III dan Sharkansky (Dalam Widodo, 2001:190).mengemukakan kebijakan public adalah:

"What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)"

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi

Jadi, Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat "paksaan" yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan



Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

#### Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement. Dalam kamus besar Webster dalam buku Wahab (2006:64; "to implement berarti to provide the means for carrying out and to give practical effect to". Menurut Van Metter dan Van Horn (2006:65) dalam Wahab implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Ripley dan Franklin (2012:148) dalam Winarno berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

#### Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu bisa kita pahami secara sederhana bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa kata. Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.

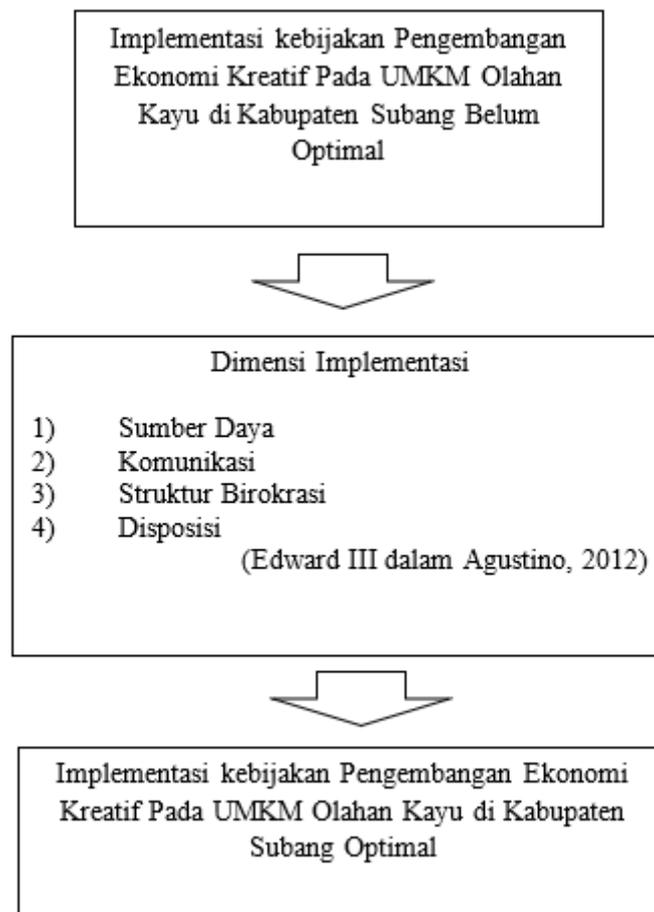
### Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul *Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (Policy Implementation and Bureaucracy)* menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu :

1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level bereau crats terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”.

(Ripley dan Franklin, 1986:89)

Gambar  
Kerangka Pikir



### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian Implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang akan optimal apabila kebijakan tersebut di dukung oleh beberapa indikator seperti komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.



## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lebih berfokus pada proses daripada hasil akhir. Artinya dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variable yang saling mempengaruhi. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dalam metode kualitatif dapat diketahui cara pandang objek peneliti lebih mendalam yang tidak diwakili dengan angka-angka statistik. Metode kualitatif lebih subjektif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Penulis memilih sample penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang tidak didasarkan pada perumusan statistik. Dengan demikian, dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu..

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer: yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif sehingga instrumen yang paling penting adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti bertugas menyusun atau merekomendasi alat (instrumen), maka penulis harus memahami segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Instrumen penelitian data menentukan kualitas perolehan data yang dikumpulkan, sehingga data yang berkualitas juga berakibat pada kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini menggunakan instrumen:

1. Pedoman wawancara terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti
2. Catatan-catatan sistematis yang disusun pada saat dilakukan observasi dilapangan yang dapat membantu untuk merekam berbagai hal berhubungan dengan objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan-bahan bacaan seperti buku-buku teoritis, makalah ilmiah,
2. dokumen pers dan sejenisnya yang berhubungan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang.



3. Studi lapangan, yaitu peninjauan lapangan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dalam penulisan laporan penelitian dengan melalui observasi langsung. Melalui desain ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran fenomena, fakta, serta sifat bagaimana adanya komperhensif dan integral.
  - b. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.
4. Sumber internet/online merupakan pencarian dengan menggunakan computer yang dilakukan melalui internet dengan alat pencarian tertentu pada sever-server yang tersambung dengan internet di seluruh dunia. Pengumpulan data audio-visual baik berupa video, foto, atau rekaman-rekaman kegiatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Pada penelitian kualitatif validitas data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu -untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi penulis dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Adapun triangulasi data yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumberperolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat seperti, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar atau foto.
2. Triangulasi data yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. ( Bogdan dalam sugiyono,2013:244).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang**

Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Indramayu di Timur, Kabupaten Sumedang di Tenggara, Kabupaten Bandung Barat di Selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007, Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 Kecamatan, yang terdiri dari 245 Desa dan 8 Kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Subang. Kabupaten ini di lintasi jalur pantura, namun ibu kota Kabupaten Subang tidak terletak di jalur. Jalur pantura di Kabupaten Subang merupakan salah satu yang



paling sibuk di Pulau Jawa. Wilayah kecamatan yang berada di Jalur ini di antaranya Ciasem dan Pamanukan. Selain dilintasi jalur Pantura, Kabupaten Subang dilintasi pula jalur jalan alternatif Sadang Cikamurang, yang melintas di tengah wilayah Kabupaten Subang dan menghubungkan Sadang, Kabupaten Purwakarta dengan Tomo, Kabupaten Sumedang. Jalur ini sangat ramai terutama pada, musim libur seperti lebaran. Kabupaten Subang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung disebelah selatan memiliki akses langsung yang sekaligus menghubungkan jalur pantura dengan kota Bandung. Jalur ini cukup nyaman dilalui dengan panorama alam yang amat indah berupa hamparan kebun teh yang udaranya sejuk dan melintas kawasan wisata air panas Ciater dan Gunung Tangkubanperahu.

Penduduk Subang pada umumnya adalah suku Sunda, yang menggunakan bahwa Sunda sebagai bahasa sehari - hari. Sementara kecamatan - kecamatan di wilayah pesisir Subang dan beberapa kecamatan di sepanjang sungai Cipunagara yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu penduduknya menggunakan bahasa Cirebon yang hampir serupa dengan bahasa Cirebon dialek Indramayu.

Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang merupakan hasil Merger antara dua SKPD yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan Dinas Koperasi dan UMKM per 1 Januari 2017. Adapun alamatnya sekarang di Jl. Ks Tubun No 14 Subang. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) disahkan menjadi Perda melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang tanggal 15 September 2016. Dengan di sahkannya persetujuan dan penetapan Perda STOK di harapkan membantu kelancaran kinerja Pemerintah Kabupaten Subang untuk bisa lebih baik. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, 4 Badan dan 30 Kecamatan.

Tugas Pokok Dinas

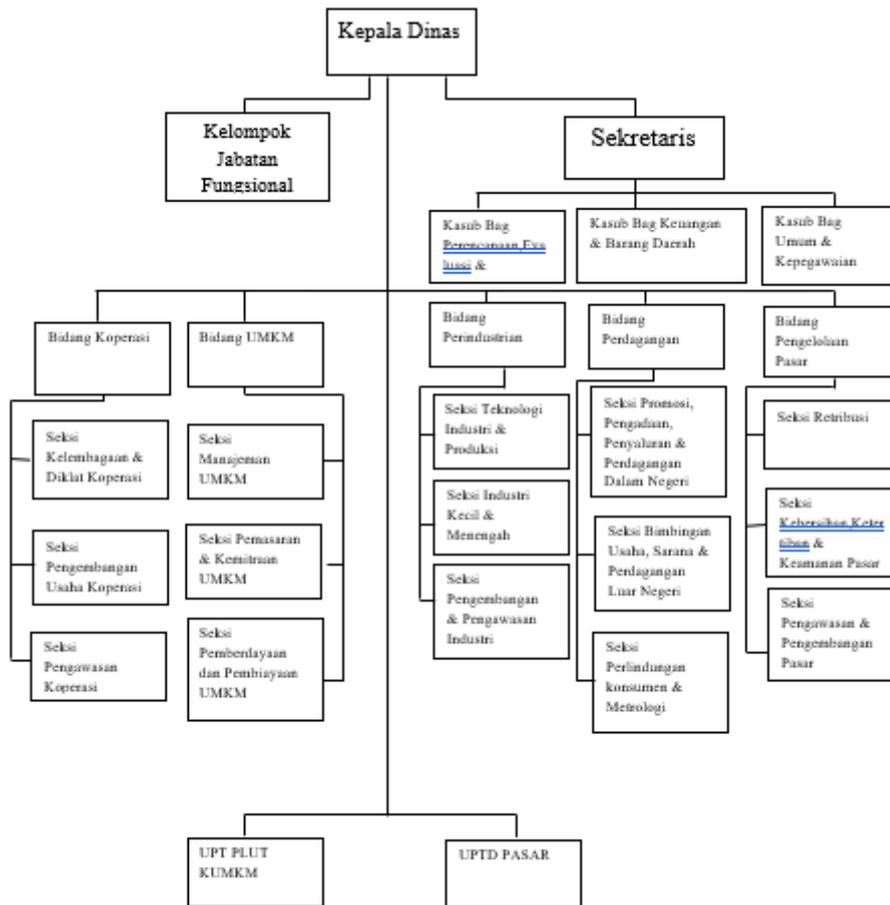
Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Fungsi Dinas

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Tabel

### Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Subang, 2020

**Tabel Koding Informan**

No	Jabatan	Kode
1	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang	I1
2	Kepala/ Staff Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang.	I2



3	Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang.	I3
4	Petugas Lapangan/ Pelaksana Kegiatan	I4
5	Pemilik UMKM Olahan Kayu	I5

### Komunikasi

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, sesuai dengan kerangka pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, maka dimensi implementasi yang pertama kali dianalisis adalah komunikasi. Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Untuk menganalisis komunikasi pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, menurut Edward III, terdapat indikator pada dimensi komunikasi yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. (Agustiono,2008:157) mengemukakan "kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat."

#### Sumber Daya

Edward III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed".

Sumber daya merupakan objek sekaligus subyek. Oleh karena itu perencanaan sumber daya yang matang dan cermat sesuai dengan kebutuhan akan membantu pencapaian sasaran tujuan secara maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan atau modal serta sumber daya teknologi.

### Karakteristik Pelaksana kebijakan Birokrasi/Lembaga (Disposisi)

Disposisi pelaksanaan kebijakan adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan, karenasetiap



kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Winarno (2005:150).

#### Pembahasan

Berdasarkan indikator penelitian bahwa dimensi komunikasi ada 3 yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada indikator transmisi, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang dalam menyampaikan pesan dari kebijakan dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan staff terkait untuk meminimalisir birokrasi, adapun media komunikasi yang sering digunakan adalah media social seperti whatsapp group. Sedangkan alat komunikasinya adalah smartphone dan computer. Adapun para penerima informasi telah terstruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sedangkan bagi objek dari kebijakan menerima informasi terkait kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ini dilakukan dalam seminar pelatihan.

Mulyana (62;2005) menjelaskan bahwa Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan pemaparan Edward III dalam Agustino (158;2006) bahwa Implementasi kebijakan akan efektif apabila aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Jadi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi dengan indikator transmisi telah optimal karena transmisi komunikasi berjalan efektif dan tidak terdapat hambatan.

Pada indikator kejelasan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompleksitas dari kebijakan ekonomi kreatif dibahas dalam rapat-rapat perencanaan sehingga tercapai consensus. Tidak ada perbendaan pandangan dari pelaksana kebijakannya, Jika kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk itu haruslah jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Berdasarkan pemaparan Edward III dalam Agustino (158;2006) bahwa Implementasi kebijakan dalam komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Jadi Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi dengan indikator kejelasan telah optimal karena komunikasi yang terjalin antara pelaksananya kebijakan dan objek kebijakan tidak terjadi pembiasan, semua dilaksanakan sesuai rencana dan prosedur yang jelas.



Indikator ketiga dalam dimensi penelitian adalah konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Instruksi dari atasan dijelaskan dengan jelas melalui rapat-rapat koordinasi saat perencanaan implementasi kebijakan ekonomi kreatif sehingga instruksi atasan tidak berbelit-belit jelas sehingga tidak kemana-mana. Menurut Edward III dalam Agustino (158;2006) Jika kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi dengan indikator konsisten telah optimal karena instruksi dilakukan dengan jelas tidak berbelit sesuai apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa implementasi kebijakan ekonomi kreatif pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang telah didukung oleh transmisi komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi serta konsistensi komunikasi. Menurut Agustino (2006:157) Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik dengan didukung oleh transmisi, konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi. Jadi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, pada dimensi komunikasi telah optimal karena telah didukung oleh konsistensi, transmisi dan kejelasan dalam berkomunikasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang belum optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III sebagai berikut :

1. Pada dimensi komunikasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, telah optimal karena transmisi komunikasi berjalan efektif dan tidak terdapat hambatan, komunikasi yang terjalin antara melaksanakan kebijakan dan objek kebijakan tidak terjadi pembiasan, semua dilaksanakan sesuai rencana dan prosedur yang jelas serta instruksi dilakukan dengan jelas tidak berbelit sesuai apa yang telah direncanakan.
2. Pada Dimensi Sumberdaya Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, belum optimal karena jumlah staff yang dirasa kurang proporsional dengan wilayah kerja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang selalu memiliki ketersediaan perlengkapan kantor,
3. Pada Dimensi Disposisi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang, telah optimal karena penunjukkan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai



dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dan para pegawai Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan telah bekerja dengan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .walaupun tidak terdapat intensif khusus

4. Pada Dimensi Birokrasi, Impelementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM olahan kayu di Kabupaten Subang telah optimal karena seluruh pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai rencana, prosedur yang ada serta terjadi koordinasi antara atasan dan bawahan

## Referensi

- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: penerbit Alfabeta.
- Arni Muhamad. Komunikasi Organisasi. 2004. Bumi Aksara: Jakarta
- Calvin S. Hall& Lindzey, 2005, Teori-Teori Sifat dan Behavioristik (Yogyakarta: Kanasius
- Chatab Nevizond. 2009.Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi. Bandung:alfabeta.
- Creswell, John W , 2010, Research design Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dedi Mulyana. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Dipohusodo Istimawan.1996. Manajemen Proyek Dan Konstruksi. Yogyakarta: KANISIUS.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik : Formuladi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PenerbitbGramedia.
- Dye, Thomas R. 2002, Publik Administration( Alih Bahasa Slamet). Jakarta : Aksara Baru.
- Edward III, George C 1980. Implementing Publik Policy.Washington Congressional Quarterly Press.
- Howard S Friedman, Miriam W Shucstask, Kepribadian Teori Klasik dan Modern, (Jakarta : Penerbit Erlangga 2000),
- Husen Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kuntjojo, 2009, Diktat Pendidikan Bimbingan Konseling, Universitas Nusantara PGRI Kediri,
- Kusdi, 2009. Teori orgnisasi dan administrasi. Jakarta: Salemba Humanika,
- Makmur Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pasolong Harbani, 2007, Teori administrasi Publik, Bandung : Penerbit Alfabeta.



Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan daerah Kabupaten Subang No. 4 tahun 2010 Te

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

R. Wayne Pace dan Don F. Faules. 2001. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Remaja Rosdakarya: Bandung

Reksohadiprodjo Sukanto, Hani Handoko.1999. Organisasi Perusahaan Teori Struktur Dan Perilaku. Yogyakarta: BPFE.

Ricky W. Griffin, 2003. Manajemen Jakarta: erlangga

Subarsono, AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tachjan,2008, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Aipi.

Umam Khaerul.2011. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

W. Griffin Ricky. 2003.Manajemen. Jakarta : Erlangga.